



Inovan Publisher

Fibonacci: Jurnal Ilmu Ekonomi, Manajemen dan Keuangan

| ISSN (Online) [3063-9387](https://doi.org/10.63217/fibonacci.v2i4.289) |

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

DOI: [10.63217/fibonacci.v2i4.289](https://doi.org/10.63217/fibonacci.v2i4.289)



Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 2022–2024

Dody Kurniawan

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta, Indonesia

Corresponding Author: dody.kurniawan@dsn.ubharajaya.ac.id

Abstract: *This study aims to analyze the influence of fiscal policy on Indonesia's economic growth during the 2022–2024 period. The fiscal policies analyzed include state revenue policies (taxation and non-tax revenue), state expenditure policies, and budget deficit management. Data were sourced from the Annual Reports of the Fiscal Policy Agency (BKF), Ministry of Finance of the Republic of Indonesia for the years 2022, 2023, and 2024, combined with a review of relevant economics journals. The research method used is descriptive-qualitative with a library research approach. The results show that expansionary post-pandemic fiscal policy in 2022 successfully drove economic growth of 5.31%, while fiscal consolidation in 2023 maintained growth at 5.05%, and in 2024 growth was targeted at 5.2% supported by a budget oriented toward economic transformation. The budget deficit narrowed from 2.38% of GDP in 2022 to 1.61% of GDP in 2023, reflecting increasingly stronger fiscal discipline. Increased tax revenue, efficient state expenditure, and prudent financing are the three main pillars supporting sustainable economic growth.*

Keywords: *Fiscal Policy, Economic Growth, State Budget, Budget Deficit, Fiscal Consolidation*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode 2022–2024. Kebijakan fiskal yang dianalisis mencakup kebijakan pendapatan negara (perpajakan dan PNBP), kebijakan belanja negara, serta pengelolaan defisit anggaran. Data bersumber dari Laporan Tahunan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2022, 2023, dan 2024, yang dikombinasikan dengan kajian literatur dari jurnal-jurnal ekonomi yang relevan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal ekspansif pasca-pandemi pada tahun 2022 berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 5,31%, kemudian konsolidasi fiskal pada tahun 2023 tetap mampu menjaga pertumbuhan di angka 5,05%, dan pada tahun 2024 pertumbuhan ditargetkan pada kisaran 5,2% didukung oleh APBN yang berorientasi pada transformasi ekonomi. Defisit APBN mengalami penyempitan dari 2,38% PDB pada tahun 2022 menjadi 1,61% PDB pada tahun 2023, mencerminkan disiplin fiskal yang semakin kuat. Penerimaan perpajakan yang meningkat, efisiensi belanja negara, dan pembiayaan yang prudent menjadi tiga pilar utama yang menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Kebijakan Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, APBN, Defisit Anggaran, Konsolidasi Fiskal

PENDAHULUAN

Kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen utama yang digunakan pemerintah dalam mengelola perekonomian suatu negara. Melalui instrumen penerimaan negara dan belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah dapat mempengaruhi tingkat permintaan agregat, stabilitas harga, distribusi pendapatan, serta laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (Rachmawaty, Oktrima, & Jati, 2024). Dalam perspektif ekonomi makro Keynesian, kebijakan fiskal ekspansif yakni peningkatan belanja negara atau penurunan pajak dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui mekanisme multiplier, terutama ketika perekonomian berada dalam kondisi di bawah kapasitas potensialnya.

Indonesia menghadapi periode yang sangat krusial pada rentang 2022 hingga 2024. Setelah pandemi COVID-19 menghantam perekonomian nasional sejak tahun 2020 dengan kontraksi ekonomi sebesar -2,07%, pemerintah Indonesia mengimplementasikan serangkaian kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif dan transformatif untuk memulihkan perekonomian. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan RI memegang peran sentral dalam merancang dan merekomendasikan kebijakan fiskal tersebut, mencakup kebijakan makro fiskal, kebijakan penerimaan negara, serta kebijakan belanja negara.

Pada tahun 2022, Indonesia memasuki era "kebangkitan pasca-pandemi" dengan agenda utama pemulihan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah menetapkan tema Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2023 yakni "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" (BKF, 2022). Memasuki tahun 2023, pemerintah melakukan konsolidasi fiskal dengan mengembalikan defisit anggaran ke bawah 3% PDB sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Selanjutnya, pada tahun 2024, APBN difokuskan sebagai instrumen utama untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus memperkuat fondasi transformasi ekonomi (BKF, 2024).

Beberapa penelitian empiris telah mengkaji hubungan antara kebijakan fiskal dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nurhayana dan Soebagiyo (2023) menemukan bahwa konsumsi pemerintah dan investasi berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam rentang 2008–2022. Sementara itu, Sari et al. (2024) dalam analisisnya menunjukkan bahwa penerimaan pajak dalam negeri berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, Pravitasari dan Insukindro (2023) menemukan bahwa interaksi kebijakan fiskal-moneter secara bersama-sama mempengaruhi perekonomian Indonesia. Meskipun demikian, studi khusus yang menganalisis dinamika kebijakan fiskal dan pertumbuhan ekonomi untuk periode 2022–2024 secara komprehensif masih terbatas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan: bagaimana pengaruh kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode 2022–2024? Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) mendeskripsikan arah dan implementasi kebijakan fiskal Indonesia periode 2022–2024, (2) menganalisis kinerja APBN dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, dan (3) mengidentifikasi kontribusi komponen-komponen kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Data yang digunakan bersifat sekunder, bersumber dari dokumen resmi pemerintah dan publikasi ilmiah terpercaya. Sumber data primer penelitian ini adalah Laporan Tahunan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk tiga periode, yaitu Laporan Tahunan BKF 2022, Laporan Tahunan BKF 2023, dan Laporan Tahunan BKF 2024. Ketiga laporan ini merupakan dokumen resmi yang memuat

kebijakan fiskal, realisasi APBN, capaian makroekonomi, serta arah kebijakan fiskal yang ditempuh pemerintah setiap tahunnya.

Sumber data sekunder meliputi artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional yang terindeks, laporan IMF Article IV Consultation untuk Indonesia, dan data statistik makroekonomi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan telaah literatur. Analisis data menggunakan teknik analisis isi (content analysis) terhadap dokumen-dokumen tersebut, yang kemudian disajikan secara deskriptif untuk menggambarkan pengaruh kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode penelitian.

Variabel yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi: (1) variabel kebijakan fiskal yang terdiri dari pendapatan negara (rasio pajak terhadap PDB, penerimaan perpajakan, dan PNBP), belanja negara (belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah), serta defisit/surplus APBN; dan (2) variabel pertumbuhan ekonomi yang diukur menggunakan laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) riil tahunan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam bidang anggaran negara, meliputi penerimaan dan pengeluaran negara, guna mempengaruhi perekonomian secara makro. Dalam teori ekonomi Keynesian, kebijakan fiskal diyakini memiliki dampak langsung terhadap tingkat output dan lapangan kerja melalui mekanisme pengganda (multiplier). Ketika pemerintah meningkatkan pengeluaran atau mengurangi pajak, permintaan agregat akan meningkat, mendorong produksi dan investasi.

Terdapat tiga fungsi utama APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal: pertama, fungsi alokasi untuk mendukung penyediaan barang publik dan mendorong pertumbuhan jangka menengah dan panjang melalui transformasi ekonomi; kedua, fungsi distribusi untuk mengurangi ketimpangan melalui program sosial; dan ketiga, fungsi stabilisasi sebagai shock absorber terhadap gejolak ekonomi dan pengendalian inflasi (BKF, 2023). Ketiga fungsi ini saling berinteraksi dalam membentuk dampak kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi.

Instrumen Kebijakan Fiskal

Instrumen kebijakan fiskal terdiri dari dua sisi utama: sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Dari sisi penerimaan, pajak merupakan instrumen utama yang berfungsi sebagai sumber pembiayaan pembangunan sekaligus alat pengaturan (regulasi). Penelitian Sari et al. (2024) mengkonfirmasi bahwa secara simultan, penerimaan pajak dalam negeri, penerimaan luar negeri, dan pajak ekspor berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari sisi pengeluaran, belanja infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial memiliki peran penting dalam mendorong produktivitas dan daya beli masyarakat. Rachmawaty, Oktrima, dan Jati (2024) menemukan bahwa kebijakan fiskal melalui pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kebijakan Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi

Hubungan antara kebijakan fiskal dan pertumbuhan ekonomi telah banyak dikaji dalam literatur ekonomi. Hasil penelitian Nurhayana dan Soebagiyo (2023) menunjukkan bahwa peningkatan konsumsi pemerintah dan investasi memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, variabel APBN secara agregat tidak selalu memiliki dampak signifikan, mengindikasikan bahwa kualitas dan arah belanja lebih menentukan daripada kuantitasnya semata. Studi Prawirosetoto (2022) juga menegaskan bahwa desentralisasi fiskal dan optimalisasi perpajakan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional.

Pada level internasional, Wang et al. (2023) menemukan bahwa kebijakan fiskal dan moneter yang terkoordinasi memiliki peran penting dalam pemulihan ekonomi pasca-krisis. Sementara studi yang dilakukan terhadap Indonesia oleh Badan Kebijakan Fiskal (2024) dan laporan IMF (2024) menegaskan bahwa konsolidasi fiskal yang bijaksana justru dapat

memperkuat pertumbuhan ekonomi jangka panjang dengan menjaga kepercayaan pasar dan stabilitas makroekonomi.

Kebijakan Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2022

Tahun 2022 merupakan tahun yang penuh momentum bagi perekonomian Indonesia. Perekonomian nasional berhasil mencatat pertumbuhan sebesar 5,31% kinerja tertinggi dalam satu dekade terakhir ditopang oleh pemulihan konsumsi rumah tangga, kenaikan harga komoditas, serta ekspansi ekspor yang signifikan (BPS, 2022 dalam BKF, 2022). Pencapaian ini tidak terlepas dari peran kebijakan fiskal yang ekspansif namun terukur yang diimplementasikan pemerintah sepanjang tahun tersebut.

Dari sisi penerimaan, reformasi perpajakan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang mulai diimplementasikan secara efektif memberikan dampak positif pada penerimaan pajak. Belanja perpajakan (tax expenditure) Indonesia pada tahun 2022 tercatat sebesar Rp323,5 triliun atau 1,65% dari PDB, meningkat 4,4% secara nominal dibandingkan tahun 2021 yang bernilai Rp310,0 triliun atau 1,83% PDB (BKF, 2023). Peningkatan nilai belanja perpajakan ini mencerminkan mulai pulihnya aktivitas perekonomian nasional yang mendorong konsumsi dan produksi.

Dari sisi pengeluaran, pemerintah mempertahankan kebijakan fiskal yang ekspansif untuk mendorong pemulihan ekonomi. Kebijakan belanja negara diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan produktivitas dan daya beli masyarakat (BKF, 2022). Belanja infrastruktur dan belanja sosial menjadi komponen penting yang memiliki efek pengganda terhadap perekonomian. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang dibahas pada tahun 2022 juga menjadi landasan reformasi struktural di sektor keuangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Meskipun kondisi global menghadirkan berbagai tantangan termasuk konflik geopolitik Rusia-Ukraina yang memicu kenaikan harga energi dan pangan, serta pengetatan kebijakan moneter global. Indonesia berhasil memanfaatkan windfall penerimaan dari kenaikan harga komoditas. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk memperlebar ruang fiskal dalam mendukung pemulihan ekonomi sambil tetap mengendalikan defisit anggaran yang selama pandemi sempat dilebarkan hingga melampaui 3% PDB.

Kebijakan Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2023

Tahun 2023 menandai babak baru dalam pengelolaan fiskal Indonesia, yakni konsolidasi fiskal setelah dua tahun defisit yang melebar akibat pandemi. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 tercatat sebesar 5,05%, sedikit melambat dibandingkan 2022 namun tetap solid di atas 5% (BPS, 2023 dalam BKF, 2024). Perlambatan ini dinilai wajar mengingat kondisi global yang menantang, termasuk melemahnya permintaan global, moderasi harga komoditas, dan masih tingginya suku bunga internasional.

Pencapaian terpenting pada tahun 2023 adalah keberhasilan konsolidasi fiskal. Defisit APBN berhasil diciutkan dari 2,38% PDB pada 2022 menjadi 1,61% PDB pada 2023 lebih baik dari target awal APBN 2023 maupun dari batas atas yang ditetapkan. Laporan IMF (2024) mencatat bahwa konsolidasi ini merupakan yang pertama kali Indonesia mencatat primary surplus (surplus keseimbangan primer sebesar 0,5% PDB) dalam hampir satu dekade terakhir, yang mengindikasikan semakin kuatnya posisi fiskal Indonesia.

Penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2024 oleh BKF menjadi tonggak penting dalam tahun ini. Pemerintah mengusulkan indikator ekonomi makro untuk RAPBN 2024 dengan pertumbuhan ekonomi ditargetkan 5,1–5,7%, inflasi 1,5–3,5%, nilai tukar rupiah Rp14.700–15.200 per USD, dan suku bunga SBN 10 tahun pada kisaran 6,49–6,91% (BKF, 2023). Tema KEM PPKF 2024 adalah "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan," yang menegaskan komitmen pemerintah untuk tidak sekadar menjaga stabilitas fiskal, tetapi juga mendorong transformasi struktural.

Pada dimensi kebijakan pendapatan, upaya optimalisasi penerimaan perpajakan terus dilakukan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan reformasi administrasi perpajakan. Sementara itu, kebijakan belanja negara semakin difokuskan pada efisiensi dan kualitas (*spending better*), dengan penguatan pada belanja infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan jaring pengaman sosial. Implementasi automatic stabilizer juga diperkuat sebagai strategi mitigasi risiko ketidakpastian global (BKF, 2022).

Kebijakan Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2024

Pada tahun 2024, APBN ditempatkan sebagai instrumen utama untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus memperkuat fondasi transformasi ekonomi. Kinerja makroekonomi tetap solid, didukung oleh konsumsi domestik, ekspor strategis, serta investasi yang terus membaik. Salah satu capaian monumental pada tahun 2024 adalah keberhasilan pengendalian inflasi yang tercatat pada level 1,57% (yoy) turun signifikan dari 2,61% pada akhir 2023 mencerminkan efektivitas sinergi kebijakan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) (BKF, 2024).

Target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% pada 2024 menjadi tantangan tersendiri di tengah dinamika perekonomian global. Untuk mendukung target ini, strategi kebijakan fiskal diarahkan pada tiga jalur: pertama, optimalisasi pendapatan negara melalui peningkatan tax ratio tanpa mengganggu iklim investasi; kedua, efisiensi dan efektivitas belanja negara dengan fokus pada program prioritas yang berdampak langsung pada pertumbuhan dan kesejahteraan; ketiga, pembiayaan yang prudent, kreatif, dan berkelanjutan untuk menutup defisit anggaran (BKF, 2024).

Penguatan linkage antara UMKM dan industri besar menjadi salah satu strategi fiskal untuk mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. BKF (2024) mengidentifikasi sektor industri manufaktur sebagai sektor strategis yang perlu diperkuat, dengan penguatan kemitraan UMKM-industri besar diharapkan menghasilkan efisiensi rantai pasok, peningkatan nilai tambah, transfer teknologi, dan penciptaan lapangan kerja. Di sisi pembiayaan, disiplin fiskal dengan batas defisit maksimal 3% PDB dan batas utang maksimal 60% PDB terus dijaga, dengan proyeksi rasio utang terhadap PDB yang tetap jauh di bawah batas aman (BKF, 2024).

Analisis Komparatif Kebijakan Fiskal 2022–2024

Untuk memberikan gambaran komprehensif, tabel berikut merangkum indikator-indikator kunci kebijakan fiskal dan pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode 2022–2024:

Tabel 1. Indikator Kebijakan Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2022–2024

Indikator	2022	2023	2024
Pertumbuhan Ekonomi (% YoY)	5,31%	5,05%	Target 5,2%
Defisit APBN (% PDB)	2,38%	1,61%	Maks. 3%
Inflasi (% YoY, akhir tahun)	5,51%	2,61%	1,57%
Belanja Perpajakan (% PDB)	1,65%	1,83%*	Meningkat
Arah Kebijakan Fiskal	Ekspansif (Pemulihan)	Konsolidasi Fiskal	Transformasi Ekonomi

Sumber: BKF (2022, 2023, 2024); IMF (2024); diolah penulis. *Angka 2021 yang dilaporkan dalam Laporan BKF 2023

Tabel 1 memperlihatkan tren yang menarik: meskipun terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi dari 5,31% (2022) menjadi 5,05% (2023), hal ini diimbangi oleh perbaikan signifikan pada indikator fiskal berupa penyempitan defisit dan pengendalian inflasi yang lebih baik. Pola ini mengindikasikan bahwa kebijakan konsolidasi fiskal yang ditempuh pada tahun 2023 berhasil menjaga stabilitas makroekonomi tanpa mengorbankan pertumbuhan secara berlebihan sebuah pencapaian yang sejalan dengan hasil penelitian Prawirosetoto dan IMF (2024) tentang pentingnya fiscal prudence dalam menjaga pertumbuhan jangka panjang.

Mekanisme Transmisi Kebijakan Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan analisis terhadap Laporan Tahunan BKF 2022–2024, terdapat beberapa mekanisme transmisi yang menghubungkan kebijakan fiskal dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia, antara lain:

Pertama, transmisi melalui belanja infrastruktur. Investasi pemerintah dalam infrastruktur fisik (jalan, pelabuhan, bandara, irigasi) dan digital (digitalisasi administrasi pemerintah) meningkatkan konektivitas dan produktivitas ekonomi, sehingga mendorong pertumbuhan jangka panjang. BKF (2024) secara eksplisit menyebut sektor konstruksi dan perumahan sebagai salah satu penopang pertumbuhan karena memiliki efek berganda yang signifikan.

Kedua, transmisi melalui insentif perpajakan. Fasilitas perpajakan yang diberikan pemerintah termasuk tax holiday, tax allowance, dan pengurangan tarif PPh Badan mendorong investasi domestik dan asing yang menjadi penggerak pertumbuhan. Pelaksanaan UU HPP secara efektif diharapkan memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan, sehingga meningkatkan rasio penerimaan perpajakan secara berkelanjutan.

Ketiga, transmisi melalui belanja sosial dan perlindungan sosial. Program bantuan sosial, subsidi energi yang tepat sasaran, serta program perlindungan sosial lainnya berperan dalam menjaga daya beli masyarakat terutama kelompok rentan, sehingga konsumsi rumah tangga sebagai komponen terbesar PDB tetap terjaga. Hal ini sejalan dengan fungsi distribusi dan stabilisasi APBN (BKF, 2023).

Keempat, transmisi melalui pengendalian inflasi. Sinergi kebijakan fiskal dalam pengendalian inflasi melalui pengaturan harga komoditas strategis, subsidi, dan koordinasi lintas instansi terbukti efektif menurunkan inflasi dari 5,51% pada akhir 2022 menjadi 2,61% pada akhir 2023, dan kemudian ke level 1,57% pada akhir 2024 (BKF, 2024). Inflasi yang terkendali mendukung stabilitas daya beli dan mendorong konsumsi maupun investasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap kebijakan fiskal Indonesia dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi pada periode 2022–2024, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pertama, kebijakan fiskal Indonesia selama 2022–2024 mengalami transisi bertahap dari ekspansi fiskal pasca-pandemi (2022), konsolidasi fiskal (2023), menuju kebijakan fiskal yang berorientasi transformasi ekonomi (2024). Transisi ini berhasil dilakukan tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga di atas 5% setiap tahunnya.
- b. Kedua, penyempitan defisit APBN dari 2,38% PDB (2022) menjadi 1,61% PDB (2023), yang lebih baik dari target dan bahkan mencapai surplus primer pertama dalam hampir satu dekade, membuktikan bahwa Indonesia memiliki kapasitas fiskal yang semakin kuat. Disiplin fiskal ini mendukung kepercayaan pasar dan stabilitas makroekonomi yang pada gilirannya menopang pertumbuhan jangka panjang.
- c. Ketiga, kebijakan fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui empat mekanisme utama: belanja infrastruktur, insentif perpajakan untuk investasi, belanja sosial untuk menjaga daya beli masyarakat, dan pengendalian inflasi. Hal ini mengonfirmasi teori Keynesian tentang efek pengganda belanja pemerintah dan sejalan dengan temuan empiris berbagai penelitian.
- d. Keempat, reformasi struktural yang dibarengi reformasi fiskal termasuk UU HPP, UU P2SK, dan berbagai insentif perpajakan memberikan dampak positif tidak hanya pada pertumbuhan jangka pendek tetapi juga pada fondasi pertumbuhan jangka menengah dan panjang menuju target Indonesia Maju 2045.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini mengajukan beberapa saran kebijakan: (1) pemerintah perlu terus meningkatkan rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB (tax ratio) yang saat ini masih tergolong rendah dibandingkan negara-negara ASEAN, guna memperluas ruang fiskal untuk belanja produktif; (2) kualitas belanja negara perlu ditingkatkan dengan memastikan alokasi yang lebih besar pada sektor-sektor dengan efek pengganda tinggi seperti

infrastruktur, pendidikan, dan teknologi; (3) sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter perlu diperkuat untuk menghadapi tantangan ketidakpastian global; dan (4) pengembangan instrumen pembiayaan kreatif dan berkelanjutan seperti green sukuk dan thematic bonds perlu terus diperluas untuk mendiversifikasi sumber pembiayaan pembangunan.

REFERENSI

- Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI. (2022). Laporan Tahunan Badan Kebijakan Fiskal 2022: Menyongsong Era Kebangkitan Pasca Pandemi. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI. (2023). Laporan Tahunan Badan Kebijakan Fiskal 2023. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI. (2024). Laporan Tahunan Badan Kebijakan Fiskal 2024. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- International Monetary Fund. (2024). Indonesia: 2024 Article IV Consultation—Press Release; Staff Report. IMF Staff Country Reports, 2024(270). <https://doi.org/10.5089/9798400284694.002>
- Nurhayana, E., & Soebagiyo, D. (2023). Dampak kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2008–2022. *JCA (Jurnal Cendekia Akuntansi)*, 4(2), 106–119. <https://doi.org/10.32503/jca.v4i2.4578>
- Pravitasari, C. F., & Insukindro, I. (2023). The impact of fiscal-monetary policy interaction on the Indonesian economy. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 20(2), 159–172. <https://doi.org/10.29259/jep.v20i2.18586>
- Prawirosetoto, F. X. Y. (2022). Desentralisasi fiskal di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2(2), 132–143.
- Priyadipa, A., Anwar, K., Darmawati, Biby, S., & Irfan, D. (2022). The effect of fiscal policy on economic growth in Indonesia. *Journal of Malikussaleh Public Economics*, 5(1). <https://doi.org/10.29103/jmpe.v5i1.8154>
- Rachmawaty, R., Oktrima, B., & Waluyo Jati. (2024). Impact analysis of monetary and fiscal policies on Indonesia's economic growth. *Jurnal Manajemen*, 28(1), 88–106. <https://doi.org/10.24912/jm.v28i1.1518>
- Sari, D. N., Jannah, R., Rizal, Y., Andiny, P., & Safuridar, S. (2024). Analisis kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi*, 2(4), 439–451. <https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v2i4.2689>
- Setiawan, H. (2018). Analisis dampak kebijakan fiskal dan moneter terhadap kinerja makroekonomi di Indonesia dengan model Structural Vector Autoregression (SVAR). *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 3(2), 23–43. <https://doi.org/10.20473/jiet.v3i2.9169>
- Susilowati, D., & Bawono, I. R. (2022). Fiscal policy and economic growth: A study on Indonesia. *Fiscal Policy, Monetary Policy and Economic Growth in Indonesia. MIMBAR*, 40(1), 44–53. ISSN 0215-8175.
- Trialdi, L., & Basri, M. C. (2024). Indonesia's fiscal policy in the aftermath of the pandemic. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. <https://doi.org/10.1080/00074918.2024.2335967>
- Wang, Y., Wang, X., Zhang, Z., Cui, Z., & Zhang, Y. (2023). Role of fiscal and monetary policies for economic recovery. *Economic Analysis and Policy*, 77, 51–63. <https://doi.org/10.1016/j.eap.2022.10.011>
- Widiastuti, N., & Sutrischastini, A. (2022). Dampak belanja pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah: Studi kasus data panel provinsi di Indonesia. *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha*, 30(2), 1–16. <https://doi.org/10.32477/jkb.v30i2.394>